

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**ANALISIS *SERVICE - LEVEL SOLVENCY* PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

ANIZA KHURMATIN

NIM : 2013310127

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

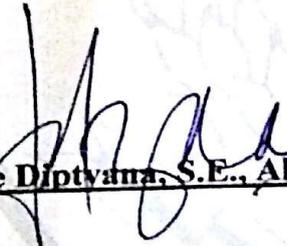
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Aniza Khurmatin
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Mei 1995
N.I.M : 2013310127
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Kosentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis *Service-Level Solvency* Pada Pemerintah daerah
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

Disetujui dan diterima baik oleh :

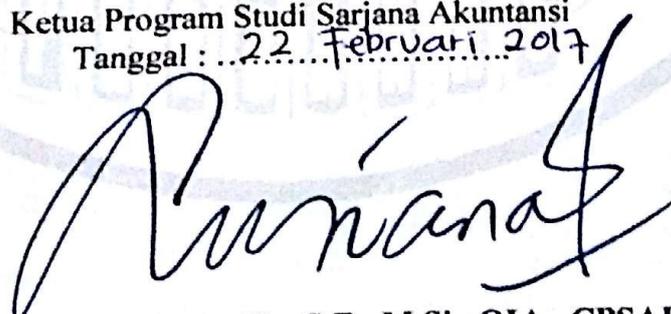
Dosen Pembimbing,
Tanggal : 16 Januari 2017

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal : 16 Januari 2017


(Pepie Dityama, S.E., Ak., M.Si.)


(Nur'aini Rokhmania, S.E., Ak., M.Ak.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 22 Februari 2017


(Dr. Luciana Spica Almiliana, S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

**ANALISIS SERVICE - LEVEL SOLVENCY PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TIMUR**

Aniza Khurmatin
2013310127
STIE Perbanas Surabaya
Email: anizakhurmatin55@gmail.com

Pepie Diptyana
STIE Perbanas Surabaya
Email: pepie@perbanas.ac.id
Jl. Wonorejo Permai Utara III No. 16, Rungkut, Surabaya

ABSTRACT

Service-level solvency of local government as the capacity of local government to supply and maintain the level of services it provides to the community from the perspective of financial information by using index ratio of total asset per capita, index ratio of total equities per capita, and index ratio of total expenditure per capita. The purpose of this research is to describe the condition of the service-level solvency of local government 38 districts/cities in East Java during the period of 2010-2014. The data was collected through documentation by searching for historical data on the published financial statements to the media. The data analysis technique is analysis descriptive comparative and cluster analysis to classify local government that have similar characteristics of service-level solvency.

The result of this research shows that all local governments showed improvement trend, Kabupaten Mojokerto was the best local government compared with to other districts, while Kabupaten Pacitan was the worst local government. And the results of cluster analysis of 38 districts/cities in East Java can be form four groups (clusters), wherein groups 1 consists of 16 districts/cities, groups 2 consists of 4 districts/cities, groups 3 consists of 14 districst/cities and groups 4 consists of 4 districts/cities..

Key words : *Service-Level Solvency, Local Government, Cluster Analysis.*

PENDAHULUAN

Indonesia telah menerapkan penyelenggaraan Pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat kebijakannya sendiri yaitu kebebasan untuk mengelola pendapatan, belanja dan pendanaanya dalam rangka pencapaian tujuan menyejahterakan masyarakat. Program dari kegiatan masing-masing Pemerintah daerah tentunya akan berbeda termasuk juga alokasi anggarannya, sehingga kemungkinan terjadi adanya variasi kondisi keuangan antar Pemerintah daerah (Ritonga *et.al.*, 2012a; 2012b).

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang perkembangannya setiap tahun sangat pesat sekali, sebagian besar lahannya telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan industri. Selain itu wilayah ini memiliki sumber daya kelautan, kehutanan dan pertambangan yang potensial untuk dikembangkan secara optimal. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Jawa Timur pada Agustus 2013 berjumlah sekitar 28,80 juta jiwa.. Jumlah tersebut, yang masuk ke dalam angkatan kerja yang bekerja mencapai 20,14 juta jiwa, dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut di sektor

pertanian sebesar 40%, sektor industri sebesar 25%, dan sektor jasa sebesar 35%.

Pemerintah daerah Jawa Timur memberikan hasil secara nyata yang dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Meskipun begitu di Pemerintah daerah Jawa Timur masih terdapat banyak masalah yang harus dihadapi.

Tantangan utama pembangunan daerah Jawa Timur adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas terutama hasil industri dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan mengetahui kondisi tersebut Pemerintah daerah diberikan hak untuk merancang kebijakan daerahnya sendiri untuk mencapai tujuan nasionalnya selama Pemerintah daerah tersebut membuat kesesuaian dengan Pemerintah daerah pusat.

Program yang di bentuk oleh Pemerintah daerah yaitu berdasarkan persepsi ekonomi dan politik yang dalam pelaksanaannya memiliki anggaran, program dan juga kegiatan yang berbeda. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas serta kuantitas barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat di masing-masing Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sehingga, tingkat Solvabilitas layanan Pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat pun juga akan berbeda (IT. Ritonga, 2013).

Tingkat solvabilitas layanan (*service-level solvency*) Pemerintah daerah merupakan kemampuan Pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan tingkat pelayanan publik yang dibutuhkan

dan diinginkan oleh masyarakat (Wang *et.al*, 2007). Kemampuan Pemerintah daerah mengacu pada semua sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas dan semua aset yang dimiliki.

Pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan berdasarkan perspektif informasi keuangan. Solvabilitas layanan Pemerintah daerah dalam melayani masyarakat digambarkan dengan indeks dan rasio-rasio solvabilitas yaitu indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks total belanja/pengeluaran (IT. Ritonga, 2013).

Ana Tresna dan Dwirandra (2015) meneliti tentang solvabilitas layanan Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang menunjukkan peningkatan setiap peningkatan di setiap indeks rasio solvabilitas layanannya, namun jika dilihat dari informasi keuangan masih menunjukkan ketidakseimbangan jumlah penduduk yang tinggi dengan aset yang rendah dimiliki dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian Victoria dan Irwan (2014) yang menunjukkan pengklasteran kondisi keuangan di Pemerintah daerah dapat memaksimalkan komparabilitas antardaerah, dengan menggunakan komponen jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam. Penelitian Irwan (2014) menyimpulkan semua Pemerintah daerah menunjukkan peningkatan di Kabupaten Kulon Progo yang terbaik, dibandingkan dengan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan belakang yang telah di jelaskan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Service-Level Solvency pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur”**.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, serta dapat melakukan perbaikan fasilitas atau sarana yang dimiliki untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (publik).

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Legitimacy Theory

Suwardjono, (2013: 588), menjelaskan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Legitimasi dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi bahwa penerimaan keputusan pemimpin atau pejabat pemerintah pelaksanaan kekuasaan yang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum. Dalam sebuah Pemerintahan negara, legitimasi ini dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan karena para pemimpin ini akan selalu berupaya keras untuk mendapatkan/mempertahankan legitimasi/kekuasaan tersebut (Dowling Jons dan Pfeffer; 1975). Legitimasi yang dimiliki Pemerintah bisa memicu kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Hal tersebut dapat dipercaya dapat membuka kesempatan yang semakin lebar bagi Pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang yang dimiliki, namun juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya menjadi tugas utama dari sebuah Pemerintah daerah

Teori legitimasi menjadi landasan bagi Pemerintah daerah untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai Pemerintah daerahnya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat Pemerintah daerah tersebut melangsungkan kegiatannya. Pemerintah daerah dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah salah satunya dengan menjadikan masyarakat sebagai pengawas atas semua

kegiatan pembangunana oleh Pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi apa bila pemerintah daerah mampu mempertahankan fasilitas publik dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat pada daerahnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini dibuat untuk pembagian urusan Pemerintahan konkuren yaitu antara Pemerintah pusat, daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan suatu Negara dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global. Hubungan dengan tingkat solvabilitas layanan adalah pembagian urusan/wewenang antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam berbagai macam bidang antara lain bidang kesehatan, pendidikan, dan perindustrian.

Standar Akuntansi Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka mulai tahun 2015 pencatatan dan pelaporan Pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Basis akrual kas pada Pemerintah daerah yaitu untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Oleh karena itu anggaran dan realisasi Pemerintah daerah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi pada kas negara atau kas daerah.

Tingkat Solvabilitas Layanan (*Service-Level Solvency*)

Pemerintah daerah pada hakekatnya adalah melayani kepentingannya sendiri dan masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai tujuan bersama (Afiah, 2009: 78). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus dapat memberikan layanan publik (masyarakat) yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu serta sekaligus meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk aktif menentukan masa depannya sendiri. Tingkat solvabilitas layanan adalah kemampuan Pemerintah daerah dalam menyediakan dan memelihara tingkat layanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pembilang dari rasio ini adalah angka yang mencerminkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah daerah digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif (IT. Ritonga, 2013). Rasio yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar fasilitas yang dimiliki Pemerintah daerah dapat digunakan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, adalah :

1. Rasio Total Aset

Rasio ini menunjukkan akumulasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah daerah yang tersedia untuk melayani masyarakat di masa yang akan datang (IT. Ritonga, 2013). Jadi semakin tinggi rasio aset terhadap jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya menggunakan sumber daya yang dimiliki.

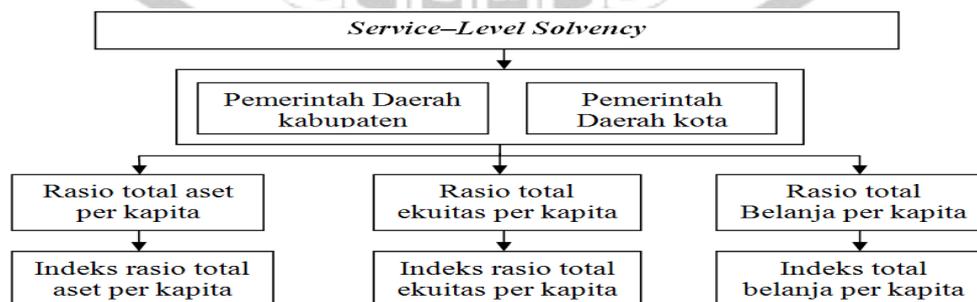
2. Rasio Total Ekuitas

Rasio ini digunakan untuk menghitung total ekuitas dari nilai aset bersih yang dimiliki Pemerintah daerah yang nantinya dapat digunakan untuk melayani masyarakat. Jadi, semakin tinggi rasio ekuitas terhadap jumlah penduduk maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah daerah untuk melayani masyarakat di masa yang akan datang (IT. Ritonga, 2013).

3. Rasio Total Belanja/Pengeluaran (*expenditure*)

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan Pemerintah daerah untuk membiayai setiap fasilitas seperti barang dan jasa masyarakat tanpa gangguan. Semakin tinggi nilai rasio ini akan menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tersebut semakin tidak efisien yang artinya total belanja/pengeluaran Pemerintah daerah baik dari internal maupun eksternal lebih besar dari jumlah penduduk yang ada (IT. Ritonga, 2013).

Kerangka pemikiran yang mendasar dari penelitian ini dapat digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Sugiyono berpendapat bahwa Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada (Supranto, 2008: 15). Populasi dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kotamadya di Jawa Timur pada periode 2010 – 2014 di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara non probabilitas dengan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yang merupakan pengambilan sampel dengan semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil. Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil pula terjadinya kesalahan/penyimpangan terhadap nilai populasi.

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ialah data sekunder karena berdasarkan sifatnya data ini berbentuk dokumentasi, sedangkan dari cara memperolehnya, yaitu dari laporan yang telah diaudit keuangan, ukuran populasi, dan tingkat inflasi. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur, yang meliputi: Laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2014. Data pada tahun 2010 dipilih karena pada Badan Pusat Statistik mengadakan sensus penduduk sehingga data mengenai jumlah populasi dapat dipercaya, serta diperoleh dari DJPK Kemenkeu untuk melihat total biaya/pengeluaran, ekuitas, dan aset Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Selain itu juga, data tingkat inflasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Jawa Timur.

Data inflasi ini digunakan untuk menghitung total pengeluaran/belanja Pemerintah daerah Jawa Timur, data ini digunakan sebagai faktor diskon untuk menyesuaikan daya beli belanja Pemerintah daerah pada tahun 2011 – 2014 dengan tahun dasar 2010. Selain itu, data populasi penduduk dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2010 sebagai tahun dasar dalam penelitian ini karena pada tahun itu BPS melakukan sensus penduduk sepanjang sepuluh tahun, sedangkan tahun 2011 hingga tahun 2014 menggunakan rata-rata pertumbuhan populasi penduduk untuk Provinsi Jawa Timur antara 20-2014 sebesar 0,69%.

Definisi Operasional Variabel

1. Peringkat Solvabilitas layanan (*Service-Level-Solvency*)

Peringkat solvabilitas layanan adalah kemampuan Pemerintah daerah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (IT. Ritonga, 2013). Variabel – variabel dalam solvabilitas layanan yang diprosikan dengan menggunakan beberapa rasio seperti rasio total aset per kapita, rasio total ekuitas per kapita, dan rasio total belanja/pengeluaran per kapita. Berikut adalah cara pengukuran Solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur:

a. Rasio Total Aset Per kapita

Rasio ini merupakan perbandingan ketersediannya jumlah sumber daya yang dimiliki Pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mengukur potensi yang dimiliki Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang (IT. Ritonga, 2013). Cara menghitung nilai total aset per kapita adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio total aset per kapita} = \frac{\text{total aset}}{\text{jumlah penduduk}}$$

b. Rasio Total Ekuitas Per kapita

Rasio ini merupakan perbandingan antara aktiva bersih yang dimiliki Pemerintah daerah terhadap keseluruhan jumlah penduduk. Aktiva bersih ini diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan kewajiban sehingga tersedia untuk memberikan layanan dimasa depan kepada masyarakat (IT. Ritonga, 2013). Cara menghitung nilai total ekuitas per kapita adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio total ekuitas per kapita} = \frac{\text{total ekuitas}}{\text{jumlah penduduk}}$$

c. Rasio Total Belanja/Pengeluaran Per kapita

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran umum dengan jumlah penduduk dimana, total pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat (IT. Ritonga, 2013). langkah-langkah yang diambil sebelum menghitung rasio total belanja sebagai berikut:

- a) Total belanja pengeluaran ini harus disesuaikan terlebih dahulu daya beli pengeluaran Pemerintah daerah tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 ke tahun dasar 2010, dengan mendiskontokan jumlah pengeluaran tahun tertentu dengan tingkat inflasi.

Untuk tahun 2011 dihitung dengan cara membagi jumlah pengeluaran untuk tahun 2011 dengan (1+inflasi tahun 2011) ; tahun 2012 membagi jumlah pengeluaran 2012 dengan (1+inflasi 2011) dikali (1+inflasi 2012); tahun 2013 membagi jumlah pen geluaran 2013 dengan (1+inflasi 2012) dikali (1+inflasi 2013); tahun 2014 membagi jumlah pengeluaran 2014 dengan (1+inflasi 2013) dikali (1+inflasi 2014). Setelah itu menghitung total belanja/pengeluaran per kapita dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio total belanja per kapita} = \frac{\text{total pengeluaran dengan inflasi}}{\text{jumlah penduduk}}$$

2. Angka Indeks dan Inflasi

Nurcholis (2005: 12), mendefinisikan indeks merupakan konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode keperiode berikutnya. Angka indeks dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan yang relatif dan dinyatakan dalam bentuk prosentase (%). Perhitungan perubahan angka indeks dari setiap rasio dimulai dari tahun 2011-2014, sedangkan untuk tahun 2010 digunakan sebagai tahun dasar dalam menghitung angka indeks pada tahun 2011. Untuk mengukur angka indeks dari setiap rasio solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indekrasio} = \frac{\text{rasio tahun sekarang} - \text{rasio tahun lalu}}{\text{rasio tahun lalu}} \times 100$$

Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi yang memperlihatkan naiknya harga barang dan jasa secara terus – menerus. Penyebab terjadinya inflasi dalam Pemerintah daerah adalah adanya pengeluaran Pemerintah lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh hal ini akan menimbulkan inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan solvabilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (IT. Ritonga, 2013). Data inflasi Jawa Timur di peroleh pada Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2014

Alat Analisis

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu teknik analisis data yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah di analisis, lalu membandingkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih dari suatu variabel tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Perbandingan dapat dianalisis menggunakan *cross section* dan *time series*.

1) *Analisis Cross-Section dan Time Series*

Mahyus (2014: 66) menjelaskan bahwa *cross-section analysis* adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan dan membandingkan suatu objek yang sejenis pada saat bersamaan dari waktu ke waktu. *Cross-section analysis* ini bermanfaat untuk membandingkan dan menganalisis layanan solvabilitas Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dari tahun 2010-2014.

Hair dan Wiliam, (2006: 215) menjelaskan *time-series analysis* merupakan perbandingan data keuangan periode sebelumnya (perbandingan data historis) atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan juga untuk melihat terjadinya perubahan terhadap data keuangan tersebut.

Time-series analysis ini menggunakan angka indeks dan bisa juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang disajikan dalam rentang waktu 5 atau 10 tahun, dari angka indeks bisa diketahui akan terjadinya penurunan atau peningkatan tingkat Solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Langkah – langkah yang digunakan dalam metode ini adalah:

1. Mengumpulkan data dimulai setelah data terkumpul, dengan langkah selanjutnya ialah menganalisis data berdasarkan metode analisis yang digunakan.
2. Tabulasi nilai aset, ekuitas, dan belanja total Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.
3. Menghitung dan mentabulasi jumlah populasi masing-masing Pemerintah daerah dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan penduduk di Jawa Timur untuk tahun 2010-2014.
4. Menghitung dan mentabulasi penyesuaian nilai belanja total yang disesuaikan dengan tingkat inflasi.

5. Menghitung dan membuat indeks Solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

6. Membuat peringkat dari masing-masing rasio solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

1) *Analisis Klaster*

Hair dan Wiliam (2006: 416) menjelaskan bahwa analisis klaster adalah mengelompokkan objek atas dasar karakteristik yang dimiliki. Analisis klaster mengelompokkan objek (responden, produk, entitas lainnya) sehingga masing-masing objek memiliki kemiripan dengan objek lain dalam klaster yang sama. Terdapat 2 metode analisis klaster yaitu metode hierarki dan metode non hierarki (*K-Means*).

Metode Non Hierarki (*K-Means*)

Metode ini adalah bagaimana memilih klaster yang ingin ditentukan terlebih dahulu jumlah *cluster* yang diinginkan. Metode ini biasa disebut dengan *K-Means Cluster*, jumlah klaster yang dibentuk berdasarkan dari tahap sebelumnya yang kemudian di gunakan untuk membagi setiap variabel dari sampel keklaster tertentu (Safa'at dan Kishera, 2014).

Pada penelitian ini menggunakan metode *cluster* yang non-hierarki (*K-Means*), dimana memilih klaster yang ingin ditentukan terlebih dan semua objek dalam jarak tertentu. Kemudian memilih *cluster* selanjutnya dan penempatan dilanjutkan sampai semua objek ditempatkan. Proses pembentukan klaster pada kelompok data Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menggunakan komponen perhitungan indeks rasio total indeks aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja/pengeluaran per kapita.

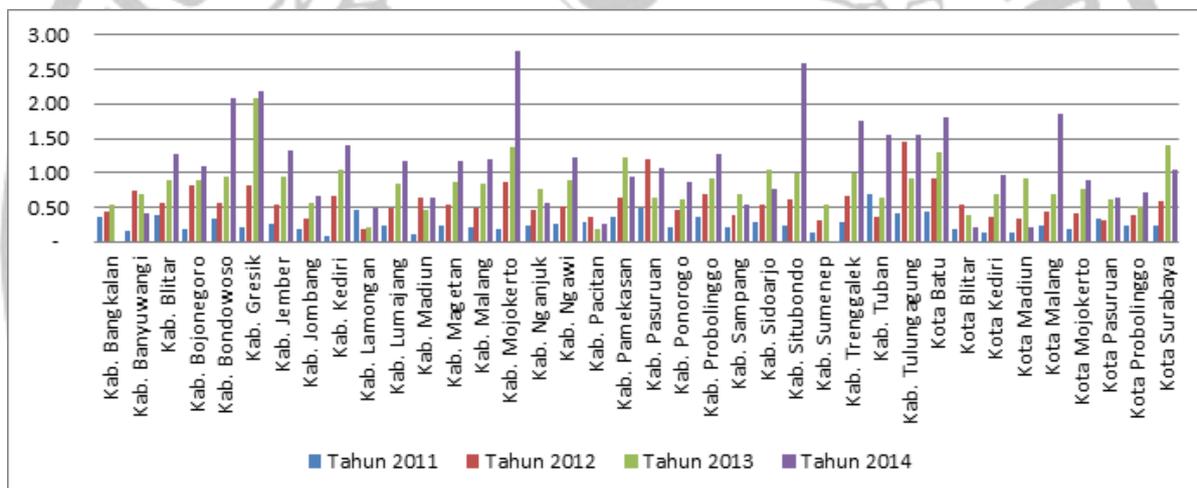
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif komparatif

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi *service-level-solvency* pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada periode 2010 – 2014, menggunakan indeks solvabilitas layanan berdasarkan perspektif informasi keuangan yaitu indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, indeks rasio total belanja/pengeluaran per kapita. Sehingga, menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan menggunakan *time series* dan *cross section* untuk menjelaskan penelitian.

Time-Series Analysis

Time-series analysis pada indeks solvabilitas layanan ini digunakan untuk membandingkan data keuangan periode sebelumnya (perbandingan data historis) yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini menggunakan rentang waktu selama 5 tahun, dengan menggunakan tahun dasar sebagai acuan, agar lebih mudah untuk melakukan perbandingan dengan tahun lainnya. Keseluruhan indeks akan dijumlahkan dan akan menghasilkan angka indeks untuk masing-masing Pemerintah daerah yang kemudian akan di *ranking* berdasarkan total indeks yang diperoleh sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 2

Grafik Indeks Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2014

Pada gambar 2 menggambarkan perolehan peringkat dari 38 kabupaten dan kota Pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur. Peringkat ini digunakan untuk memberi penilaian terhadap Pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan fasilitas kepada masyarakat. Semakin tinggi peringkat Pemerintah daerah tersebut yang diperoleh maka semakin baik Pemerintah daerah tersebut dalam menyediakan solvabilitas layanan.

Peringkat indeks solvabilitas layanan Pemerintah terbaik selama 2011-2014 menunjukkan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Pemerintah daerah daerah yang memiliki solvabilitas layanan terbaik dibandingkan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto memiliki potensi industri kecil dan menengah dalam bidang perhiasan dan bidang tekstil yang seluruh mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah Mojokerto dari tahun ke tahun menunjukkan

peningkatan yang sangat bagus dalam solvabilitas layanan. Kebijakan umum yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto seperti peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya terlihat lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah daerah lainnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan merupakan Kabupaten dengan solvabilitas layanan kurang baik yang berada pada *ranking* bawah dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya kondisi Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan yang berada pada posisi terendah ini terjadi karena ketidakmerataan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah setempat dengan letak geografis Kabupaten Pacitan, sehingga membuat dari perspektif keuangan memiliki solvabilitas layanan yang kurang baik.

Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Tuban, Tulungagung, dan Pemerintah Kota Blitar, Kota Madiun, dan Kota Pasuruan menunjukkan peringkat yang berfluktuasi. Hal ini mungkin terjadi karena pertumbuhan Kabupaten dan Kota lainnya di Jawa Timur yang lain lebih tinggi setiap tahunnya, sehingga nilai dari indeks dan rasio beberapa Kabupaten dan Kota mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil.

Pemerintah kabupaten Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kediri, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Pemerintah Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Probolinggo mengalami peningkatan indeks di setiap tahunnya, Hal ini dapat dilihat dari peringkat di setiap indeks solvabilitas layanan yang diamati selain tingkat pertumbuhan yang meningkat begitu tinggi disetiap tahunnya yang menyebabkan Pemerintah daerah ini menjadi salah satu

kabupaten yang memiliki indeks yang stabil pada tahun 2011-2014.

Kemampuan Pemerintah daerah Kota Surabaya sebagai salah satu Pemerintah daerah yang merupakan Pemerintah daerah yang memiliki pelayanan publik terbaik dari Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, namun jika dilihat dari solvabilitas layanan dengan pendekatan perspektif keuangan memiliki nilai solvabilitas keuangan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari posisi Pemerintah daerah Kota Surabaya yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang begitu banyak sehingga semua aset yang dimiliki bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Surabaya menghasilkan solvabilitas layanan di kurang baik.

Cross-Section Analysis

a) **Peringkat Rasio Total Aset Per kapita**

Rasio ini merupakan perbandingan ketersediannya jumlah sumber daya yang dimiliki Pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Tabel 2 menjelaskan kondisi Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berdasarkan peringkat rasio total aset per kapita.

Tabel 2
Top 5 Peringkat Rasio Total Aset Per Kapita Tahun 2010-2014 (dalam dupiah)

Peringkat	Rasio Total Aset Per Kapita		
	Pemerintah daerah	Jumlah	Periode
1	Kota Blitar	3x	2010-2012
2	Kota Madiun	3x	2010-2012
3	Kota Surabaya	4x	2010-2013, dan 2014
4	Kota Mojokerto	3x	2010-2012
5	Kota Kediri	4x	2010-2014

Sumber: Data sekunder di rangkum penulis

Tabel 2 menunjukkan sebaran lima besar peringkat rasio total aset per kapita di Jawa Timur. Peringkat digunakan untuk

mengukur potensi yang dimiliki Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat di masa depan. Jumlah total aset masing-masing Pemerintah daerah di peroleh dari laporan keuangan (Neraca). Semakin tinggi rasio aset yang diperoleh oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki. Rasio total aset per kapita dihitung dari perbandingan total aset yang didapatkan oleh Pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk yang telah disesuaikan. Pada penelitian ini peringkat lima teratas didominasi oleh Pemerintah daerah Kota, yaitu peringkat pertama rasio total aset Pemerintah daerah adalah Kota Blitar menunjukkan kecenderungan meningkat terus dari tahun 2010 ke 2012. Kota Madiun dengan total aset per kapita sebesar Rp. 15.223.108,52 pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 16.489.909,36. Pada peringkat ketiga Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 dengan total aset per kapita Rp. 13.586.940,75, yang artinya Kota Surabaya memiliki kapasitas Rp. 13.586.940,75 untuk melayani kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Peringkat keempat Kota Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012 dengan total aset perkapita sebesar Rp. 10.678.216,85 ke Rp. 12.365.920,39. Peringkat kelima Kota Kediri yang mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 dengan total aset per kapita sebesar Rp. 11.542.589,33, yang artinya Kota Kediri memiliki Rp. 11.542.589,33 aset untuk melayani setiap kebutuhan masyarakatnya.

Tingkat laju pertumbuhan rasio total aset perkapita pada kelima Pemerintah daerah Kota diatas. Kota Blitar menunjukkan tingkat laju pertumbuhan terkecil 6,80% selama tahun 2010-2014, Kota Madiun menunjukkan perbaikan dari tahun 2010-2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan 13,15%, dan untuk

laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2010-2014 adalah Kota Kediri sebesar 43,08% dengan peningkatan rasio dari tahun ke tahun, Kota Surabaya sebagai Ibukota Jawa Timur memperoleh laju pertumbuhan sebesar 15,44% selama tahun 2010-2014, dan yang terakhir Kota Mojokerto laju pertumbuhannya sebesar 43,68%.

b) Peringkat Rasio Total Ekuitas Per kapita

Rasio ini merupakan perbandingan antara aktiva bersih yang dimiliki Pemerintah daerah terhadap jumlah keseluruhan penduduk. Tabel 3 menjelaskan kondisi Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan peringkat rasio total ekuitas per kapita.

Tabel 3
Top 5 Peringkat Rasio Total Ekuitas Per Kapita Tahun 2010-2014 (dalam rupiah)

Peringkat	Rasio Total Ekuitas Per Kapita		
	Pemerintah daerah	Jumlah	Periode
1	Kota Blitar	2x	2010 dan 2012
	Kota Madiun		2011 dan 2013
2	Kota Blitar	2x	2013 dan 2014
	Kota Madiun		2010 dan 2012
3	Kota Surabaya	2x	2010 dan 2012
	Kota Mojokerto		2011-2013
4	Kota Mojokerto	2x	2010 dan 2012
	Kota Kediri		2011 dan 2014
5	Kota Kediri	3x	2010, 2012, dan 2014

Tabel 3 menunjukkan sebaran lima besar peringkat rasio total ekuitas per kapita di Jawa Timur. Peringkat digunakan untuk mengukur aktiva bersih yang dimiliki Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat di masa depan. Jumlah total ekuitas masing-masing

Pemerintah daerah di peroleh dari laporan keuangan (Neraca). Semakin tinggi rasio ekuitas yang diperoleh oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat menggunakan aktiva bersih yang dimiliki. Rasio total ekuitas per kapita dihitung dari perbandingan total ekuitas yang didapatkan oleh Pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk yang telah disesuaikan. Pada penelitian ini peringkat lima teratas didominasi oleh Pemerintah daerah Kota, yaitu peringkat pertama dan kedua rasio total ekuitas adalah Pemerintah daerah Kota Blitar dan Kota Madiun yang menunjukkan kecenderungan meningkat terus dari tahun 2010-2014. Peringkat ketiga sampai kelima diduduki oleh Kota Mojokerto, Kota Surabaya dan Kota Kediri yang mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014.

Tingkat laju pertumbuhan rasio total ekuitas perkapita pada kelima Pemerintah daerah Kota diatas. Kota Blitar menunjukkan tingkat laju pertumbuhan terkecil 7,15% selama tahun 2010-2014, Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan laju pertumbuhan 13,39%, dan untuk laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2010-2014 adalah Kota Kediri sebesar 42,84%, dan laju pertumbuhan Kota Surabaya sebesar 75,76% dengan laju pertumbuhan paling tinggi.

c. Peringkat Rasio Total Belanja/Pengeluaran Per kapita

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran umum dengan jumlah penduduk, dimana total pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakatnya. Jumlah total belanja/pengeluaran masing-masing Pemerintah daerah diperoleh dari laporan keuangan (Realisasi Anggaran), belanja umum (daerah) meliputi belanja pegawai, belanja barang noninvestasi, pembayaran bunga hutang, subsidi, hibah bantuan sosial dan belanja operasional lainnya.

Total belanja/pengeluaran daerah dilakukan untuk menghilangkan efek inflasi agar informasi data sebanding, penyesuaian daya beli pengeluaran pemerintah daerah untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dengan 2010 sebagai tahun tahun dasar yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. Tabel 4 menjelaskan kondisi Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berdasarkan peringkat rasio total belanja/pengeluaran yang telah disesuaikan per kapita.

Tabel 4
Top 5 Peringkat Rasio Total Belanja/Pengeluaran Per Kapita Tahun 2010-2014 (dalam rupiah)

Peringkat	Rasio Total Belanja Per Kapita		
	Pemerintah daerah	Jumlah	Periode
1	Kota Mojokerto	3x	2010, 2011, dan 2014
2	Kota Blitar	3x	2010, 2011, dan 2014
3	Kota Madiun	4x	2010-2013, dan 2014
4	Kota Kediri	4x	2010, dan 2012-2014
5	Kota Probolinggo	3x	2012-2014

Tabel 4 menunjukkan sebaran lima besar peringkat rasio total belanja/pengeluaran per kapita di Jawa Timur. Semakin tinggi rasio belanja/pengeluaran yang diperoleh akan menunjukkan bahwa Pemerintah daerah semakin tidak efisien, yaitu total belanja/pengeluaran Pemerintah daerah baik dari internal maupun eksternal lebih besar dari jumlah penduduk yang disesuaikan. Pada penelitian ini peringkat lima teratas didominasi oleh Pemerintah daerah Kota, yaitu peringkat pertama rasio total aset Pemerintah daerah adalah Kota Mojokerto menunjukkan kecenderungan meningkat terus dari tahun 2010 ke 2014.

belanja/pengeluaran per kapita sebesar Rp. 4.964.955,94 pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp.8.216.412,23. Peringkat ketiga Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 dengan total belanja/pengeluaran per kapita Rp. 8.174.013,80, yang artinya Kota Madiun melakukan pengeluaran sebesar Rp. 8.174.013,80 untuk melayani kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Peringkat keempat Kota Kediri mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 dengan total belanja/pengeluaran perkapita sebesar Rp.33.961,48, ke Rp. 6.705.648,82. Peringkat kelima Kota Probolinggo yang mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014 dengan total belanja/pengeluaran per kapita

Tingkat laju pertumbuhan rasio total belanja/pengeluaran per kapita, Kota Kediri menunjukkan tingkat laju pertumbuhan terkecil 54,72,% selama tahun 2010-2014, Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan laju pertumbuhan 77,97%, dan untuk laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2010-2014 adalah Kota Blitar sebesar 65,49%, dan laju pertumbuhan Kota Probolinggo sebesar 62,08%. Kondisi pada rasio total belanja/pengeluaran yang telah disesuaikan ini menunjukkan komitmen peningkatan tren seluruh Pemerintah daerah untuk memberikan barang dan jasa kepada masyarakat selama tahun 2010-2014.

Cluster Analysis

Uji Asumsi Cluster Analysis

Standarisasi indeks solvabilitas layanan ke bentuk *z-score* perlu dilakukan mengingat data yang terkumpul memiliki variabilitas satuan. Variabel akan disimpan pada nilai yang telah distandarisasi. Nilai baku dalam bentuk *z-score* inilah yang akan digunakan sebagai dasar pada proses analisis selanjutnya. Dengan menggunakan nilai yang telah distandarisasi, data *outlier* pada kelompok data dapat dideteksi..

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa angka dan indeks solvabilitas layanan yang merupakan jumlah keseluruhan dari indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja/pengeluaran per kapita. Penelitian ini menggunakan *service-level solvency* dengan jumlah sampel sebanyak 29 Pemerintah daerah kabupaten dan 9 Pemerintah daerah Kota di Jawa Timur.

Analisis klaster dengan metode Non Hierarki (K-Means)

Metode ini adalah bagaimana memilih klaster yang ingin ditentukan terlebih dahulu jumlah *cluster* yang diinginkan. Metode ini biasa disebut dengan *K-Means Cluster*, jumlah klaster yang dibentuk berdasarkan dari tahap sebelumnya yang kemudian di gunakan untuk membagi setiap variabel dari sampel ke klaster tertentu (Ghozali, 2012: 405)

Tabel 5
Final Cluster dari Metode K-Means

Number of Cases in each Cluster		
Cluster	1	16.000
	2	4.000
	3	14.000
	4	4.000
Valid		38.000
Missing		.000

Sumber: Data diolah

Tabel 6
Final Cluster dari Metode K-Means

Final Cluster Centers				
	Cluster			
	1	2	3	4
Zscore(ASET)	-0.81233	2.08544	.45523	-.42943
Zscore(EKUITAS)	-.87209	2.08728	.44687	-.16297
Zscore(BELANJA)	-.36253	-.30590	-.24672	2.61955

Sumber: Data diolah

Tabel 7
Hasil Tingkat Signifikansi Klaster

Anova						
	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	Df	Mean Square	Df		
Zscore(ASET)	10.531	3	.159	34	66.225	.000
Zscore(EKUITAS)	10.832	3	.132	34	81.798	.000
Zscore(BELANJA)	10.259	3	.183	34	56.058	.000

Sumber: Data diolah

Tabel 8
Rata-Rata Indeks Solvabilitas Tiap Klaster

Klaster	Rata-rat Indeks Rasio Solvabilitas Layanan			Total (%)
	Indeks Rasio Aset (%)	Indeks Rasio Ekuitas (%)	Indeks Rasio Belanja (%)	
1	62.26%	59.69%	50.54%	172.48%
2	215.52%	216.41%	52.49%	484.31%
3	129.32%	129.59%	54.53%	313.54%
4	82.20%	97.29%	165.27%	344.66%

Sumber: Data dirangkum oleh penulis

Tabel 5 menjelaskan analisis klaster *K-Means* menunjukkan bahwa terbentuk empat kelas untuk mengelompokkan perolehan indeks rasio solvabilitas layanan Pemerintah daerah di Jawa Timur. Kolom *cluster* menunjukkan jumlah kelas, penelitian ini menggunakan empat kelas. Sehingga dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Klaster 1 terdiri dari 16 Pemerintah daerah. Klaster 1 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam kategori “sangat rendah” dalam

solvabilitas layanan Pemerintah daerah di Jawa Timur.

2. Klaster 2 terdiri dari 4 Pemerintah daerah. Klaster 2 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam kategori “sangat tinggi” dalam solvabilitas layanan Pemerintah daerah di Jawa Timur.

3. Klaster 3 terdiri dari 14 Pemerintah daerah. Klaster 3 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam kategori “rendah” dalam solvabilitas layanan Pemerintah daerah di Jawa Timur.

4. Klaster 4 terdiri dari 4 Pemerintah daerah. Klaster 4 merupakan kelompok pemda yang termasuk dalam kategori “tinggi” dalam solvabilitas layanan Pemerintah daerah di Jawa Timur.

Tabel 6 menjelaskan merupakan proses akhir dari *K-Means Cluster*. Kolom *Zscore* keseluruhan total indeks rasio solvabilitas layanan pada tahun 2011-2014 pada *final cluster centers* merupakan angka standarisasi yang dapat menunjukkan nilai masing-masing kelas berdasarkan rata-rata total indeks rasio solvabilitas layanan secara keseluruhan populasi. Jika kolom kelas menunjukan angka *Zscore* masing-masing indeks negatif artinya nilai pada kelas tersebut berada dibawah rata-rata nilai seluruh populasi, jika kolom kelas menunjukan angka *Zscore* indeks positif artinya nilai pada kelas tersebut berada diatas rata-rata nilai seluruh populasi.

Tabel 7 menjelaskan semakin besar nilai F hitung yang diperoleh maka semakin besar perbedaan antara klaster-klaster yang terbentuk dengan tingkat signifikansi (sig) $< 0,05$; maka semakin besar perbedaan antara empat klaster yang terbentuk. Pada kolom nilai F masing-masing indeks solvabilitas layanan menunjukan bahwa nilai F terbesar adalah 81.798 (indeks rasio total ekuitas per kapita), kemudian 66.225 (indeks rasio total aset per kapita), dan diikuti (indeks rasio total belanja per kapita) dengan nilai F sebesar 56.058. Dari ketiga komponen indeks solvabilitas layanan tersebut memberikan perbedaan yang paling berarti pada klaster yang terbentuk, dengan diperolehnya tingkat signifikansi (sig) 0,000 yang $< 0,05$.

Tabel 8 menjelaskan karakteristik tiap kelompok Pemerintah daerah. Karakteristik tiap kelompok digambarkan dengan indeks rasio solvabilitas layanan masing-masing Pemerintah daerah. Untuk mengetahui karakteristik setiap klaster maka perlu dihitung nilai rata-rata untuk setiap Indeks pada masing-masing klaster.

1. Klaster 1 terdiri dari 16 Pemerintah daerah yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sampang, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Bangkalan, Kota Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, Kota Probolinggo dan Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah ini memiliki rata-rata indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja per kapita yang paling rendah dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Klaster 1 mendapat rata rata indeks rasio total aset per kapita sebesar 62,26%, rata-rata indeks rasio total ekuitas per kapita sebesar 59,69%, dan rata-rata indeks rasio total belanja per kapita sebesar 50,54 %. Secara keseluruhan, indeks solvabilitas layanan klaster 1 merupakan indeks yang paling rendah jika dibandingkan klaster yang lainnya. Klaster 1 mendapat rata-rata indeks solvabilitas layanan sebesar 172,48%, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada klaster 1 merupakan Pemerintah daerah yang memiliki indeks solvabilitas layanan yang dapat dikategorikan sangat rendah.

2. Klaster 2 yang terdiri dari 4 Pemerintah daerah yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Situbondo, Kota Batu, dan Kabupaten Mojokerto. Pemerintah daerah ini memiliki rata-rata indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja per kapita yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Klaster 2 mendapat rata rata indeks rasio total aset per kapita sebesar 215,52%, rata-rata indeks rasio total ekuitas per kapita sebesar 216,41 %, dan rata-rata indeks rasio

total belanja per kapita sebesar 52,49 %. Secara keseluruhan, indeks solvabilitas layanan klaster 2 merupakan indeks yang paling tinggi jika dibandingkan klaster yang lainnya. Klaster 2 mendapat rata-rata indeks solvabilitas layanan sebesar 484,41%, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada klaster 2 merupakan Pemerintah daerah yang memiliki indeks solvabilitas layanan yang dapat dikategorikan sangat tinggi.

3. Klaster 3 yang terdiri dari 14 Pemerintah daerah yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember. Pemerintah daerah ini memiliki rata-rata indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja per kapita yang rendah jika dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Klaster 3 mendapat rata-rata indeks rasio total aset per kapita sebesar 129,32%, rata-rata indeks rasio total ekuitas per kapita sebesar 129,59 %, dan rata-rata indeks rasio total belanja per kapita sebesar 54,63 %. Secara keseluruhan, indeks solvabilitas layanan klaster 3 merupakan indeks yang rendah jika dibandingkan klaster yang lainnya. Klaster 3 mendapat rata-rata indeks solvabilitas layanan sebesar 313,54%, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada klaster 3 merupakan Pemerintah daerah yang memiliki indeks Solvabilitas layanan yang dapat dikategorikan dikategorikan rendah.

Klaster 4 terdiri dari 4 Pemerintah

daerah yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Pemerintah daerah ini memiliki rata-rata indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja per kapita yang tinggi jika dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Klaster 4 mendapat rata-rata indeks rasio total aset per kapita sebesar 82,20%, rata-rata indeks rasio total ekuitas per kapita sebesar 97,29 %, dan rata-rata indeks rasio total belanja per kapita sebesar 165,27%. Secara keseluruhan, indeks solvabilitas layanan klaster 4 merupakan nilai tertinggi kedua. Klaster 4 mendapat rata-rata nilai sebesar 344,76 %, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah daerah yang berada pada klaster 4 merupakan Pemerintah daerah yang memiliki nilai indeks solvabilitas layanan yang dapat dikategorikan tinggi. Hasil ini konsisten dengan teori legitimasi yaitu dengan dibentuknya kelompok/klaster dalam Pemerintahan tersebut akan menunjukkan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam satu kelompok yang bersarkan kriteria solvabilitas layanannya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *kondisi service-level solvency* pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2010-2014 dengan menggunakan persepektif informasi keuangan berdasarkan indeks solvabilitas layanan yang terdiri dari indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, dan indeks rasio total belanja/pengeluaran per kapita terdapat 38 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada peningkatan tingkat solvabilitas layanan untuk semua

Pemerintah daerah selama tahun 2010-2014 seperti yang ditunjukkan tren ke atas untuk semua rasio solvabilitas tingkat layanan dengan berbagai tingkat pertumbuhan.

2. Indeks solvabilitas layanan terbaik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2014 adalah Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, yang ditunjukkan dengan peningkatan di setiap indeks rasio solvabilitas layanannya, sedangkan Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan sebagai Kabupaten yang memiliki peringkat terendah.
3. Peringkat rasio total aset per kapita dan rasio total ekuitas terbaik adalah Pemerintah daerah Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan diikuti Pemerintah daerah Kota Kediri. Sedangkan, peringkat rasio total belanja/pengeluaran per kapita terbaik adalah Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Kediri, dan diikuti Kota Probolinggo yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan daya beli belanja Pemerintah daerah Kota Mojokerto untuk menghasilkan barang dan jasa bagi keperluan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
4. Dari proses pembentukan klaster pada Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur didapatkan 4 klaster dengan rincian anggota dan karakteristik sebagai berikut :
 - Klaster 1 terdiri dari 16 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Klaster ini memiliki rata-rata indeks rasio total solvabilitas layanan yang sangat rendah dibanding dengan klaster lain.
 - Klaster 2 terdiri dari 4 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Klaster ini memiliki rata-rata indeks rasio

total Solvabilitas layanan yang sangat tinggi di banding dengan klaster lain karena, sebagian besar Pemerintah daerah ini memiliki kegiatan perekonomian yang sangat tinggi/baik.

- Klaster 3 terdiri dari 14 Pemerintah daerah Kabupaten. Klaster ini memiliki rata-rata indeks rasio solvabilitas layanan yang rendah di banding dengan klaster lain.
- Klaster 4 terdiri dari 4 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Klaster ini memiliki rata-rata indeks rasio solvabilitas layanan yang tinggi di banding dengan klaster lain karena, sebagian besar Pemerintah daerah ini merupakan pusat perdagangan dan pendidikan yang terbaik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2014 untuk Pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dan Sumenep tidak melaporkan hasil laporan keuangan mereka, dikarenakan pada Pemerintah daerah tersebut terkena kasus yang berurusan dengan badan hukum. Sehingga, peneliti tidak bisa memperoleh data dari laporan keuangan Pemerintah daerah tersebut.
2. Pada analisis klaster yang memiliki subjektivitas yang tinggi, termasuk dalam hal pemilihan variabel/indikator dengan menggunakan metode yang berbeda pada data yang sama akan dapat menghasilkan pengelompokan kriteria yang berbeda.

Peneliti ingin memberikan saran untuk penelitian selanjutnya maupun untuk Pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan rasio-rasio solvabilitas layanan Pemerintah daerah untuk

mengukur seberapa baik solvabilitas layanan Pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya, misalnya seperti rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio kemandirian.

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel Pemerintah daerah selain yang ada di Jawa Timur, mengingat solvabilitas layanan Pemerintah daerah di masing-masing daerah berbeda

DAFTAR RUJUKAN

- Afiah, N. N. (2009). Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Edisi Pertama*. Jakarta: Prena Media Group.
- Amaliyah, F., & Wibawati, W. (2012). Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 1(1), D188-D193.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2016. Data Dinamis Perekonomian Jawa Timur Januari-2016. Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Gorontalo: PT Indeks.
- Dowling, John dan J. Pfeffer. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review* Vol. 18 No. 1 hal. 122-136.
- Dwi, R., & Sholihin, M. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. *Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPPM STIM YKPN.
- Dwirandra, A., & Purnamasari, A.N. (2015). Peringkat Solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(3),705-722.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. *Edisi Enam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Jr. Joseph.F., & Black, W.C. 2006. *Multivariate Data Analysis*. Sixth Edition. New Jersey : Pearson Education, Inc.
- Hidayatullah, K.H., & Yulianto, S. (2014). Analisis Klaster Untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Statistika*, 2(1).
- J. Supranto. (2008). Statistik: Teori dan Aplikasi. *Edisi Ketujuh*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahyus, E. (2014). Analisis Data Time Series Untuk Penelitian, Manajemen dan Akuntansi. *Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, L.J (2002). Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurcholish, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah

daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Amon Makarti*, 7(13).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

<http://www.bpsjatim.go.id>

Priyambodo, V. K., Ritonga, I. T. (2014). Pengklasteran Pemerintah daerah Untuk Memaksimalkan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Ritonga, I. T. (2014). Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia. *International Journal of Governmental Financial Management*, 14(2), 19-33.

Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition Of Local Government In Indonesia: An Exploration. *Public And Municipal Finance*, 1(2).

Sarwono, J. (2015). Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi.

Suwardjono (2013). Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi enam. Yogyakarta:BPFE.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.